

KEPEMIMPINAN PRESIDEN MEGAWATI PADA ERA KRISIS MULTIDIMENSI, 2001-2004

THE LEADERSHIP OF PRESIDENT MEGAWATI IN THE ERA OF MULTIDIMENSIONAL CRISIS, 2001-2004

Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
(megawatisoekarnoputri.msp@gmail.com)

Abstrak – Pada 1997 - 1998, Indonesia menghadapi berbagai macam krisis yang menimbulkan gejolak dan mengubah jalannya sejarah bangsa ini. Dimulai dari krisis ekonomi nasional, dan berlanjut pada munculnya berbagai bentuk ancaman, seperti konflik etnis dan agama, serta maraknya separatisme dan terorisme. Krisis multidimensi tersebut berpotensi menghantar Indonesia pada perpecahan dan dicap sebagai negara gagal. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang hubungan antara krisis multidimensi dan kepemimpinan presiden pada kurun waktu tahun 2001 hingga 2004. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipakai untuk menggali *tacit knowledge* dari pengambil keputusan tertinggi saat itu, yang tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Byman dan Pollack (2001) sebagai pisau analisis dengan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian yang diperoleh antara lain, walaupun dalam masa pemerintahan yang relatif singkat, kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil mengatasi sebagian besar krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia saat itu. Kebijakan strategis di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lingkungan diambil dengan landasan pemikiran yang inovatif, melalui berbagai upaya dialog, perundingan, pembuatan program, pengesahan peraturan perundang-undangan, hingga pemberlakuan operasi militer demi menjaga kedaulatan dan keamanan Negara Indonesia. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut masih bisa dirasakan hingga saat ini, seperti pemilihan umum secara langsung, otonomi daerah, meletakkan fondasi pembangunan kemaritiman. Keberhasilan tersebut menjadi landasan yang kokoh bagi presiden selanjutnya untuk melanjutkan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Salah satu kontribusi penelitian ini adalah mengeksplisitkan aspek-aspek yang melatarbelakangi pengambilan keputusan strategis pada era 2001-2004, yang diharapkan bisa berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan saran praktis dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan kebijakan strategis pembangunan, baik pada tataran suatu negara maupun global.

Kata Kunci : kebijakan strategis, kepemimpinan presiden, kepemimpinan strategis, krisis multidimensi, pembangunan nasional

Abstract – In 1997 - 1998, Indonesia faced various crises that caused turmoil and changed the course of this nation's history. Starting from the national economic crisis, and continues to the emergence of various forms of threats, such as ethnic and religious conflicts, as well as rampant separatism and terrorism. This multidimensional crisis has the potential to lead Indonesia to a division and to be labeled a failed state. This study aims to provide an understanding of the relationship between multidimensional crises and presidential leadership from 2001 to 2004. To achieve this goal, qualitative research with a case study approach was used to explore *tacit knowledge* from the highest decision makers at that time, who was none other than the fifth President of Republic of Indonesia, Megawati Soekarnoputri. This study uses the theoretical framework of Byman and Pollack (2001) as an analysis instrument with qualitative research methods. The results of the research found that during her relatively short administration, President Megawati Soekarnoputri's leadership was successful in overcoming most of the multidimensional crises faced by Indonesia at that time. Strategic policies

in the economic, political, legal, social and environmental fields are taken with an innovative basis of thought, through various efforts in dialogue, negotiations, programming, enactment of laws and regulations, to enacting military operations in order to safeguard the sovereignty and security of the Indonesian State. The impact of these various policies can still be felt today, such as direct elections, regional autonomy, laying the foundations for maritime development. This success has provided a solid foundation for the next president to continue the development program and increase the welfare of the people in Indonesia. One of the contributions of this research is to make clear the aspects underlying strategic decision making in the 2001-2004 era, which are expected to be useful for the development of science and practical advice in the process of formulating strategic development planning and policies, both at the level of a country and globally.

Keywords: multidimensional crisis, national development, presidential leadership, strategic leadership, strategic policy

Pendahuluan

Pada tahun 1997-1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang akhirnya berkembang menjadi krisis nasional. Krisis ini bermula dari hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan perekonomian nasional dalam menghadapi krisis keuangan yang juga melanda negara-negara kawasan Asia. Krisis tersebut terjadi karena peningkatan utang swasta berjangka pendek maupun jangka panjang yang mencapai sekitar 157% PDB pada tahun 1998 (Kuncoro, 2011). Namun, utang-utang tersebut ternyata tidak dimanfaatkan pada sektor yang produktif seperti pertanian, kelautan dan perikanan, industri manufaktur (pengolahan), dan industri komoditas ekspor, tetapi justru ditanamkan pada sektor-sektor kurang produktif, seperti: konsumsi, *real estate* dan lainnya. Di sisi lain, pertumbuhan sektor perbankan yang semakin pesat ternyata tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga banyak bank di Indonesia yang ‘tidak sehat’ dan pada

akhirnya menimbulkan kredit macet yang tidak terkendali (Basri, 2011). Kedua kondisi ini kemudian dihadapkan dengan terdepresiasinya nilai kurs rupiah yang sangat tajam akibat krisis finansial yang terjadi di Thailand. Pada saat itu, bank-bank yang ada di Indonesia tidak mampu menahan krisis tersebut dan justru menyebabkan krisis berskala nasional (Badang Kebijakan Fiskal, 2012). Krisis tersebut terus berlangsung hingga tahun 2001 dan berdampak pada kebijakan presiden selaku pemimpin Negara selanjutnya.

Selain krisis ekonomi, pada kurun waktu tahun 2001-2004, Indonesia juga mengalami beberapa ancaman nasional, seperti: konflik etnis dan agama, serta ancaman separatisme dan terorisme. Menurut Wirutomo (2003), konflik etnis yang terjadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: 1) terjadinya perubahan konstelasi politik pada masa reformasi dan iklim kebebasan yang dijunjung tinggi menjadi lahan untuk mengungkapkan keresahan beberapa

kelompok etnik dan 2) tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.

Hasil kajian Harahap (2018) mengungkapkan bahwa pernah terjadi konflik bernuansa etnis dan agama di beberapa wilayah Indonesia sebagai akibat dari dinamika politik, sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh konflik etnis yang terjadi di Indonesia antara lain: konflik suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat. Sedangkan contoh konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia adalah: 1) konflik antara penganut agama Kristen dan Islam di Ambon, Maluku, pada tahun 1998-2000 dan 2) konflik agama yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, pada tahun 1998-2001.

Di sisi lain, hasil kajian Windiani (2017) mengungkapkan bahwa Indonesia juga pernah mengalami beberapa ancaman separatisme dan terorisme pada kurun waktu 2000-2004 berupa:

- a. Ancaman teror di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan serta rumah Dubes Filipina pada tahun 2000;
- b. Peledakan beberapa Gereja di malam Natal pada tahun 2000 dan 2001;
- c. Peledakan bom di Kuta Bali dan di Mc Donald Makasar pada tahun 2002;
- d. Peledakan bom di JW Marriot pada tahun 2003; dan

- e. Peledakan bom di Kedubes Australia pada tahun 2004.

Ancaman terorisme tersebut terjadi karena salah satu kelompok teroris yang paling sering diduga bertanggungjawab terhadap aksi-aksi teror di dunia berbasis di Indonesia, yaitu kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Kelompok teroris tersebut diperkirakan merupakan salah satu jaringan teroris internasional, Al-Qaeda.

Berbagai ancaman di atas datang silih berganti beriringan dengan pergantian pemimpin di Indonesia. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan yang berat bagi seorang pemimpin untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan suatu negara sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terkait kepemimpinan presiden Indonesia dalam menghadapi krisis multidimensi tersebut. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan sebuah penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kepemimpinan presiden pada era krisis multidimensi pada kurun waktu tahun 2001 hingga 2004.

Kepemimpinan Strategis

Isu utama dalam kajian-kajian ilmiah tentang kepemimpinan terfokus pada bagaimana pemimpin mampu melakukan perubahan pada lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Atau dengan kata lain, kajian ilmiah berupaya menjelaskan seperti apa pemimpin yang efektif, yaitu

yang mampu menggerakkan pengikutnya melakukan perubahan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, fokus atau pendekatan penelitian tentang kepemimpinan juga mengalami pergeseran (Byman, 1986). Pendekatan klasik yang muncul mula-mula adalah pemimpin yang efektif dilihat karakternya (misalnya ramah, baik, sifat sosial), dan perilaku atau *behavioral* (misalnya berempati pada bawahan, mendorong orang lain untuk maju). Dalam perkembangan selanjutnya, penelitian bergeser pada pendekatan kontigensi. Pemimpin yang efektif bergantung pada kesesuaian antara situasi yang dihadapi dan gaya kepemimpinannya (Fielder, 1967).

Saat ini, penelitian tentang kepemimpinan didominasi oleh paham yang dikenal sebagai *new leadership theories* (Avolio, 2007), seperti kepemimpinan transaksional versus transformasional, dan kepemimpinan autentik. Kepemimpinan transaksional lebih mengutamakan paradigma *behavior-reward*, dimana hubungan antara pemimpin dan para pengikutnya lebih didasarkan pada pertukaran usaha dan kerja dari para pekerja untuk mendapatkan kompensasi. Perilaku utama pemimpin transaksional yang efektif adalah mengetahui apa yang ingin didapatkan pengikut dan menjanjikan kompensasi yang relevan.

Sementara itu, kepemimpinan transformasional lebih berupaya untuk menantang anggota organisasi untuk melahirkan karya-karya yang istimewa. Kepemimpinan transformasional sangat efektif dalam memadukan pendekatan "*behavioral*" (orientasi pada manusia) dan "*contingency*" (orientasi pada situasi). Tipe kepemimpinan ini sesuai untuk organisasi yang dinamis, yang mementingkan perubahan, dan/atau berada dalam lingkungan yang bergejolak, seperti krisis multidimensi di Indonesia pada awal era reformasi. Salah satu syarat penting keberhasilan kepemimpinan transformasional adalah sang pemimpin memiliki karisma dan mampu menggunakannya secara tepat.

Kepemimpinan transformasional tidak menggerakkan para pengikutnya berdasarkan hubungan biaya-manfaat personal, melainkan menginspirasi pengikutnya untuk terlibat sebagai agen perubahan untuk memperoleh manfaat bersama. Pemimpin transformasional secara intelektual merangsang dan membantu untuk memfasilitasi berpikir rasional dan *problem solving* pada pengikut. Kepemimpinan transformasional yang efektif termasuk kemampuannya membuat semua bawahannya merasa menjadi bagian dari kelompoknya (*in-group*). Sebagian besar penelitian telah membuktikan bahwa hasil kerja yang didapatkan dari kepemimpinan

transformasional adalah positif.

Seorang peneliti dari Harvard Business School, Larry Greiner, pada tahun 1972 menjelaskan bahwa organisasi yang tumbuh selalu diwarnai dengan masa tenang (evolusi) dan masa bergolak (krisis atau revolusi). Organisasi yang terus tumbuh selalu berhasil melewati setiap masa krisis. Salah satu kunci keberhasilan tersebut adalah kepemimpinan transformasional yang efektif di organisasi tersebut.

Kepemimpinan transformasional ini menjadi fondasi utama untuk memahami bagaimana Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membawa perubahan, melewati krisis multidimensi (yang mengancam gagalnya Indonesia sebagai sebuah bangsa), hingga mampu menghantar Indonesia pada era yang lebih stabil di masa selanjutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan studi kasus tujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam dan komprehensif tentang sebuah fenomena yang dialami subyek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2008). Pendekatan yang dipakai adalah studi kasus *tacit knowledge* dengan yang

bermaksud untuk mendeskripsikan hasil penelitian dan menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan ini umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran seseorang.

Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti merupakan sebuah kasus yang memerlukan pengkajian secara deskriptif kualitatif yang mendalam (Moleong, 2008). Menurut Yin (2013), pendekatan studi kasus dapat didefinisikan sebagai kegiatan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan. Pendekatan studi kasus cocok dipakai untuk mendalami pertanyaan mengapa (*why*) atau bagaimana (*how*) atas sebuah fenomena (Yin, 2013).

Pada penelitian ini, fenomena yang ingin didalami adalah kepemimpinan Presiden RI Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001-2004, dengan mengamati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

Sedangkan konteks yang melingkupinya adalah krisis multidimensi di awal era reformasi.

Analisis dan Pembahasan

Permasalahan utama pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah kondisi Indonesia yang sedang berada dalam krisis multidimensional. Sebagian besar dari krisis tersebut merupakan bagian dan kelanjutan dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan dan krisis keamanan nasional yang telah dilanda oleh Indonesia sejak tahun 1997 (Lukman, 2004). Selain itu, Indonesia juga mengalami beberapa krisis yang merupakan imbas dari perkembangan lingkungan internasional yang menyebabkan terjadinya krisis global.

Dalam menghadapi krisis multidimensional tersebut, negara sebagai institusi tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam penyelesaian krisis melalui penerbitan dan implementasi berbagai kebijakan sangat bergantung terhadap faktor kepemimpinan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Daniel L. Byman dan Kenneth M. Pollack dalam jurnalnya yang berjudul *“Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesman Back In”*, individu yang menempati posisi pemimpin negara mempunyai peranan penting dalam membentuk intensi, pengaruh, kekuatan, strategi, hingga

perilaku negara secara keseluruhan sebagai sebuah institusi.

Krisis keamanan multidimensional yang dihadapi Indonesia selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan ranah politik domestik sekaligus politik internasional. Sehingga kajian mengenai kepemimpinan negara merupakan hal yang esensial mengingat posisi pemimpin negara sebagai aktor utama yang terlibat di dalam pengambilan keputusan di level domestik sekaligus figur representasi utama sebuah negara di level internasional. Pandangan teoretis mengenai pentingnya faktor kepemimpinan tersebut tertuang dalam jurnal Robert D. Putnam yang berjudul *“Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”*.

Barry Buzan (1991), pakar keamanan dunia dalam bukunya yang berjudul *“People, States and Fears: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War”* membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Lima bidang di sektor keamanan inilah yang menjadi tantangan dan prioritas kebijakan pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 –20 Oktober 2004). Sehingga dilaksanakan analisis terkait kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri sesuai dengan konsep keamanan nasional sebagai berikut:

Kepemimpinan Presiden Megawati pada Bidang Ekonomi

Sejak pertama kali dilantik, sistem pemerintahan Presiden Megawati berupaya memberikan kondisi yang kondusif untuk membangun kembali ekonomi yang porak poranda sejak terjadinya krisis, pendarahan dan koma ekonomi-politik sejak 1998 hingga 2001. Empat masalah utama di bidang ekonomi adalah utang jatuh tempo, kas negara yang tidak memadai, masih lemahnya daya beli masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan asing kepada Indonesia. Keempat masalah ini membutuhkan penyelesaian segera dan simultan jika tidak ingin Indonesia jatuh ke dalam krisis utang.

Pada awal masa pemerintahannya, Indonesia memiliki utang sebesar USD 150,8 milyar sebagai warisan dari Orde Baru (Robinson & Rosser, 1998). Nilai utang tersebut lebih dari 90% PDB Indonesia sehingga Indonesia tidak punya akses ke pasar uang dan pasar modal internasional.

Sebagai seorang pemimpin, Presiden Megawati mengikuti perundingan *Paris Club* dan *London Club* sebagai upaya untuk menegosiasikan ulang utang-utang Indonesia pada saat itu. Alhasil, Megawati berhasil meminta penundaan pembayaran utang sebesar USD 5,8 milyar pada pertemuan *Paris Club* 12 April 2002. Selanjutnya, pada tahun 2003,

Indonesia menganggarkan pembayaran utang Negara sebesar 116,3 triliun rupiah.

Selain itu, sejak krisis ekonomi 1997, pendapatan per kapita bangsa Indonesia hanya sebesar USD 465. Namun berkat kebijakan pemulihan situasi keamanan, pendapatan per kapita naik menjadi USD 930 pada 2004. Namun tidak sampai satu bulan setelah dilantik, pasar merespons ketenangan Megawati.

Pada tahun 2002, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 57,158 Milyar dan impor sebesar USD 1,229 Milyar. Selanjutnya, nilai ekspor dan impor pada tahun 2003 terus naik dan mencapai nilai USD 61,02 Milyar untuk ekspor dan USD 32,39 Milyar untuk impor. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN tahun 2003 terbukti mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional sebanyak 4,1% dan menekan inflasi sebesar 5,06%. Kebijakan privatisasi ini dilakukan dalam kondisi krisis untuk melindungi perusahaan negara dari intervensi publik dan pembayaran utang negara.

Di sisi lain, Presiden Megawati juga berhasil membangun kerja sama dengan *International Monetary Fund* (IMF) dengan menugaskan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D selaku Menko Perekonomian, Dr. Boediono selaku Menteri Keuangan dan Burhanuddin Abdullah selaku Gubernur Bank Indonesia untuk menyelesaikan sekitar 20 *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF dan *World Bank*. Kondisi tersebut

berdampak pada adanya kucuran pinjaman IMF sebesar sekitar SDR 400 juta untuk memperkuat posisi cadangan devisa setiap LOI yang diterima.

Presiden Megawati juga terus-menerus meyakinkan bahwa Indonesia tetap teguh kepada agenda Reformasi, yang disertai demokratisasi dan desentralisasi kepada Dunia Usaha dari AS, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Akhirnya, CGI, IMF, dan *World Bank*, serta pihak-pihak Penanaman Modal Asing (PMA) bersedia melaksanakan program-program yang diajukan oleh Kabinet Gotong Royong.

Menurut Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, M.A., Ph.D selaku Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Gotong Royong menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuktikan bahwa kesabaran dan kegigihan presiden Megawati dalam mempertahankan martabat Negara Indonesia di mata dunia berhasil. Pendapat ini didukung oleh Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec selaku Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong yang mengungkapkan bahwa suasana politik di dalam negeri mulai membaik dan tidak lagi terdengar suara-suara yang mempertanyakan kesinambungan fiskal Indonesia diantara para pelaku pasar dunia (Dahuri dan Samah, 2019).

Presiden Megawati juga berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis energi setelah berhasil meyakinkan

banyak pimpinan perusahaan energi dunia untuk melakukan investasi langsung di bidang perminyakan yang berhasil mencapai angka Rp. 200 triliun per tahun. Beberapa proyek raksasa migas juga terus berlangsung hingga tahun 2008 sebagaimana penjelasan Prof. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D yang saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Gotong Royong (Dahuri & Samah, 2019).

Disisi lain, menurut Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec selaku Menteri Pertanian di Kabinet Gotong Royong mengungkapkan bahwa pada masa akhir Kabinet Gotong Royong, Indonesia berhasil keluar dari krisis pangan yang ditandai dengan produksi komoditas pangan yang relatif tinggi dan harga-harga pangan sudah terkendali, serta tidak dirasakan lagi unjuk rasa para petani, pekebun, peternak dan konsumen. Selain itu, impor pangan juga dapat ditekan, bahkan pada tahun 2004 pemerintah melarang impor beras sebagai bentuk usaha pemanfaatan swadaya pangan nasional (Dahuri & Samah, 2019).

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Kabinet Gotong Royong mengungkapkan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri sejak awal pemerintahannya pada Juli 2001 telah menetapkan Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dan sektor

unggulan (*leading sector*). Kemudian, pada 7 Juli 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan GERBANG MINA BAHARI (Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan) diatas Kapal Dalpele, TNI-AL di Teluk Tomini. Pada intinya GERBANG MINA BAHARI menetapkan sektor Kelautan dan Perikanan, Pariwisata Bahari, Industri dan Jasa Maritim, dan Perhubungan Laut sebagai *prime mover* (penghela) pembangunan ekonomi nasional. Secara simultan, sektor-sektor pembangunan lainnya dan kebijakan politik-ekonomi mendukung sektor-sektor *prime mover* tersebut. Sedangkan, dasar dari pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan), yakni mengharmoniskan antara upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan perlestarian lingkungan.

Hasilnya sangat menggembirakan, yang tercermin pada peningkatan volume produksi perikanan, nilai ekspor, kontribusi sektior kelautan dan perikanan terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB), kesejahteraan nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat pesisir, dan indeks kualitas lingkungan pesisir dan laut (Dahuri & Samah, 2019).

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. selaku Menteri Kehakiman dan HAM Kabinet Gotong Royong juga

mengungkapkan bahwa kerja sama yang baik antara Kabinet Gotong Royong berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi yang dihadapi kala itu. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Negara mengelola krisis terus meningkat (Dahuri & Samah, 2019).

Kepemimpinan Presiden Megawati pada Bidang Politik

Kestabilan pemerintahan Indonesia merupakan hal yang penting saat awal pemerintahan Presiden Megawati. Hal ini diperlukan untuk memantapkan kondisi nasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu, salah satu langkah awal yang diambil oleh Presiden Megawati saat menjabat adalah membangun tatanan politik yang baru melalui amandemen UUD 1945. Selanjutnya, pemerintah melakukan penyesuaian seluruh ketentuan perundang-undangan sesuai dengan amandemen yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah juga menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang belum dimiliki dalam rangka untuk melengkapi amanat UUD 1945 setelah amandemen. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

2. Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Belajar dari pemerintahan presiden sebelumnya, Presiden Megawati Soekarnoputri lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945 (Wuryandari, 2008).

Presiden Megawati Soekarnoputri juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi berbagai wilayah konflik di Tanah Air seperti: Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat. Dengan kata lain, anggaran presiden ke luar negeri dapat dihemat dan dialokasikan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat di daerah-daerah tersebut, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar

negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Yang lebih penting, untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintahan Megawati Soekarnoputri memiliki *sense of urgency* dan *sense of crisis* yang belum berhasil dibangun pemerintahan sebelumnya (Wuryandari, 2008).

Menurut Jenderal TNI Hari Sabarno, S.I.P., M.M. selaku Menteri Dalam Negeri Kabinet Gotong Royong mengungkapkan bahwa konsep pemerintahan saat itu berfokus pada kebijakan desentralisasi, dimana penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan secara adil untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional. Dalam konsep memandu otonomi daerah dan menjaga kesatuan bangsa, arah kebijakan desentralisasi yang diambil adalah:

1. memberlakukan kebijakan otonomi daerah yang proporsional dan konsisten,
2. menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil,
3. meningkatkan pemerataan pelayanan publik yang mudah terakses,
4. memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta

5. menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi (Dahuri dan Samah, 2019).

Kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pembangunan otonomi daerah ini bertujuan untuk mendorong kemampuan daerah dalam mengelola dan mengatur masyarakat dan wilayahnya secara mandiri. Kemandirian yang tercipta diharapkan akan mampu mendorong terjadinya percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah (Komunitas Peduli Komunikasi Indonesia, 2004).

Di sisi lain, Presiden Megawati mengembalikan hak pilih kepada rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2004. Hal ini tercatat dalam sejarah demokrasi yang dilaksanakan secara rapi, bersemangat dan terpuji. Sehingga suara rakyat kembali diperhitungkan dan menjadi penentu terpilihnya anggota pemerintahan. Pada tahun yang sama, Presiden Megawati menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden secara langsung secara serentak pada tanggal 5 April 2004. Kegiatan pemilu ini diikuti oleh 48 Partai politik. Dimana pada

proses pemilu Presiden dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran. Putaran pertama tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004 (Dahuri dan Samah, 2019).

Kepemimpinan Presiden Megawati pada Bidang Sosial

Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kabinet Gotong Royong berhasil menuntaskan konflik sosial hingga peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada di tengah masyarakat, pemerintah melakukan berbagai pendekatan, baik yang bersifat politik, sosial maupun kultural. Berikut adalah beberapa konflik yang berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Megawati:

- a. Penyelesaian Konflik Poso yang telah berlangsung sejak tahun 1998 melalui perjanjian Malino I yang dilaksanakan di Malino selama 15 hari. Perjanjian tersebut dilaksanakan oleh Jusuf Kalla selaku Menko Kesra era Presiden Megawati pada tanggal 20 Desember 2001.
- b. Penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh melalui upaya dialog dan perundingan, hingga akhirnya diterapkan darurat militer dan melaksanakan operasi terpadu untuk mengatasi kelompok separatis di Aceh, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

- c. Penyelesaian Konflik Ambon, Maluku, melalui perundingan damai. Dimana pemerintah memfasilitasi 5 (lima) kali kegiatan perundingan dengan 2 (dua) kelompok yang berkonflik. Perundingan tersebut dilaksanakan di Malino selama 17 hari. Perundingan tersebut menghasilkan Deklarasi Malino II pada tanggal 12 Februari 2002.
- d. Pemulihan Pariwisata Pasca Bom Bali melalui 4 (empat) program pemulihan, yaitu: *Rescue*, *Rehabilitasi*, *Normalisasi* dan *Ekspansi*. Kegiatan pemulihan tersebut berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan manca negara yang sempat merosot pasca tragedi bom Bali. Keberhasilan ini juga mengembalikan kepercayaan dunia kepada pariwisata Indonesia.
- e. Penanganan Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia melalui penyusunan kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Hal ini menjadi langkah awal penanganan menyeluruh pemerintah Indonesia terhadap para pahlawan devisa Negara.

Penyelesaian konflik-konflik tersebut dijelaskan oleh Muhammad Jusuf Kalla dalam buku “*The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong*” karya Dahuri dan Samah (2019).

Munculnya gerakan separatis di Aceh dan Papua, serta konflik sosial yang terjadi di Poso dan Maluku tentunya sangat mengancam keamanan nasional Indonesia. Dalam menghadapi konflik tersebut, Presiden Megawati mencoba menyelesaikan konflik melalui upaya perdamaian. Selain itu, maraknya aksi separatisme dan terorisme di Indonesia membuat Presiden Megawati dan kabinetnya bersikap tegas dengan cara menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), yaitu: Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tersebut pada peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 (Komunitas Peduli Komunikasi Indonesia, 2004). Melalui penerbitan kedua Perppu ini, presiden berharap proses pengungkapan kasus terorisme di Indonesia menjadi lebih mudah dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Perppu tersebut juga menjadi landasan hukum yang kuat bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan operasi pemberantasan kelompok terorisme di Indonesia (Adian, 2003).

Selain itu, masalah sosial lain yang dialami oleh Indonesia pada masa pemerintahan presiden Megawati adalah masalah kemiskinan. Hal ini

timbul sebagai akibat dari krisis moneter yang menyebabkan banyak pabrik yang ditutup dan terpaksa memutus hubungan kerja (PHK) para karyawannya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan pengangguran dan kriminalitas yang semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar negara miskin di dunia bersama Kamboja, Ghana dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah sosial ini, Presiden Megawati mengeluarkan beberapa kebijakan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, program Jaring Pengaman Sosial, program Pemberdayaan Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, dan lain sebagainya (Sumantyo, 2008).

Kepemimpinan Presiden Megawati pada Bidang Lingkungan

Pada bidang lingkungan, pemerintahan Presiden Megawati belajar dari masa lalu terkait kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian memulai beberapa langkah progresif, diantaranya melalui penamaan pulau-pulau di Indonesia yang tak berpenghuni. Pengarsipan nama-nama pulau kini semakin digiatkan, dan ide tersebut tentu saja datang dari Presiden Megawati (Dahuri dan Samah, 2019).

Selain itu, Presiden Megawati juga sempat menghentikan beberapa aktivitas pertambangan yang dinilai merusak

lingkungan, seperti:

- a. Aktivitas pertambangan *Freeport* di Papua yang dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL (dampak lingkungan);
- b. Kontrak pertambangan minyak *Caltex* di Blok Natuna Kepulauan Riau; dan
- c. Kontrak pertambangan Migas *Caltex* di Riau Daratan (Dahuri dan Samah, 2019).

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Dr. Ir. Mohamad Prakosa, Ph.D selaku Menteri Kehutanan Kabinet Gotong Royong, pada tahun 2003 pemerintahan Presiden Megawati meluncurkan program penanaman pohon skala besar dalam bentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) untuk pertama kalinya. Program GERHAN ini untuk menyikapi perlunya rehabilitasi wilayah terdegradasi yang luasnya semakin meningkat dan kerusakan hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini (Dahuri dan Samah, 2019).

Kepemimpinan Presiden Megawati pada Bidang Militer

Reformasi nasional dan penciptaan situasi masyarakat yang lebih demokratis memerlukan peran TNI yang dinamis, siap, dan mampu melakukan penyesuaian dengan berbagai perubahan yang ada. Hal

ini dinyatakan oleh Presiden Megawati sebagai berikut: *“The TNI has pledged its commitment to continue carrying out its internal reforms by way of taking concrete measures to position itself professionally and functionally as the instrument of state defense and to uphold the enforcement of democracy as well as to abide by the law and to respect human rights”*.

Salah satu peran TNI di dalam sistem politik demokratis yang dilakukan Presiden Megawati juga secara khusus memutuskan transfer wewenang pelaksanaan operasi keamanan di Maluku dari tangan Polisi ke tangan TNI yang terbukti efektif untuk memulihkan stabilitas keamanan pada tahun 2002. Presiden Megawati juga menghidupkan kembali Kodam Iskandar Muda pada bulan Februari 2002. Selanjutnya, pada tahun 2003, Megawati menetapkan status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dengan dukungan penuh dari parlemen. Sekitar 30.000 personel TNI dan 12.000 personel Polri dikirim ke Aceh untuk melakukan operasi kontra-pemberontakan dan supervisi urusan sipil.

Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. selaku Menteri Kehakiman dan HAM Kabinet Gotong Royong, perubahan yang cukup besar pada bidang militer didasarkan pada pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Disahkannya undang-undang tersebut

membuat perubahan yang cukup besar dan mendasar pada organisasi TNI/Polri. Dimana kebijakan yang tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 kemudian menjadi cikal bakal baik definisi, tujuan, peran, fungsi, sasaran dan pelaksana pertahanan negara. Selain menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman bagi rakyatnya dan membangun perdamaian dengan negara lain, kebijakan pertahanan ini juga memasukkan aspek geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sebagai salah satu pertimbangan penyusunan pertahanan negara. Dalam kebijakan pertahanan tersebut, TNI ditempatkan sebagai komponen utama pertahanan yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Megawati berusaha menarik lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan untuk membantu TNI dalam menghadapi ancaman non-militer. TNI juga diberikan empat tugas pokok yakni mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia secara regional maupun internasional (Dahuri dan Samah, 2019).

Di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, peningkatan kesejahteraan personel TNI dan Polri

terus digalakkan. Bantuan presiden itu sekiranya akan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI/Polri dan keluarganya. Selain itu, bantuan tersebut juga akan dipakai sebagai peningkatan disiplin dan moral para prajurit TNI dan Polri.

Rumah-rumah dinas TNI dan Polri tersebut adalah bantuan Presiden pada 2002 senilai Rp 7,5 miliar untuk masing-masing angkatan di lingkungan

TNI/Polri. Sejatinya, bantuan tersebut berwujud ratusan unit rumah, perbaikan mess serta berbagai sarana fisik milik TNI/Polri lainnya. Selain itu, Presiden Megawati juga menempatkan beberapa purnawirawan TNI/Polri untuk masuk ke dunia politik menjadi Gubernur di dalam proses politik melalui pemilihan baik DPRD Provinsi maupun Pemilukada secara langsung. Berikut adalah beberapa daftar purnawirawan tersebut:

Tabel 1. Daftar Purnawirawan TNI/Polri yang didukung Presiden Megawati menjadi Gubernur

No	Nama	Jabatan	Masa Bakti
1	Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) H. Sutiyoso	Gubernur DKI Jakarta ke-14	6 Oktober 1997 –7 Oktober 2007
2	Mayjen TNI (Purn.) Raden Nana Nuriana	Gubernur Jawa Barat ke-13	13 Juni 1993 –13 Juni 2003
3	Mayjen TNI (Purn.) H. Imam UtomoSoeparno	Gubernur Jawa Timur ke-12	23 Agustus 1998 –26 Agustus 2008
4	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Mardiyanto	Gubernur Jawa Tengah ke-11	1998–2008
5	Mayor Jenderal TNI (AD) H. Suwarna Abdul Fatah	Gubernur Kalimantan Timur ke-10 dan 11	2003-2006
6	Mayjen TNI (Purn.) H. Amin Syam	Gubernur Sulawesi Selatan ke-6	19 Januari 2003 –19 Januari 2008
7	Mayor Jenderal TNI (Purn) Haji Tengku Rizal Nurdin	Gubernur Sumatera Utara ke-1	15 Juni 1998 –5 September 2005
8	Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Bibit Waluyo	Gubernur Jawa Tengah ke-13	23 Agustus 2008 –23 Agustus 2013
9	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Tri Tamtomo	Calon Gubernur Sumatera Utara	Pemilukada langsung, tidak terpilih
10	Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar	Calon Gubernur Jawa Barat	Pemilukada langsung, tidak terpilih
11	Brigjen TNI (Purn) Karel A. Ralahalu	Gubernur Maluku ke-13	2003 –2013
12	Mayjen TNI (Purn) Zainal Basri Palaguna	Gubernur Sulawesi Selatan ke-5	1993 –2003
13	Komjen Pol (Purn) I Made Mangku Pastika	Gubernur Bali	2008 –2013

Sumber: Dahuri dan Samah, 2019.

Masa kepemimpinan Megawati menorehkan tinta emas dalam penataan hubungan sipil-militer di Indonesia. Keputusan Panglima TNI Endriartono Sutartodi tahun 2002 bahwa TNI tidak akan duduk di MPR mulai tahun 2004, lima tahun lebih cepat dari rencana semula, yaitu: tahun 2009 menjadi catatan yang sangat positif. Tahun 2004 DPR-RI berhasil menuntaskan dan mengesahkan Undang-undang No. 34 tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Undang-undang TNI ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemisahan TNI dari panggung politik nasional.

Di kancah internasional, Amerika Serikat pernah menetapkan embargo militer terhadap Indonesia dengan cara menghentikan penjualan seluruh peralatan maupun suku cadang Alutsista ke Indonesia. Saat itu, Presiden AS, Bill Clinton menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur.

Embargo tersebut mengakibatkan Indonesia tidak bisa membeli peralatan militer termasuk suku cadang alutsista strategis berupa pesawat tempur F-16 dan F-5. Kondisi ini menyebabkan penurunan tingkat kesiapan alutsista TNI sampai 50 persen. Nasib serupa juga dialami alutsista TNI yang dibeli dari sekutu AS seperti: *tank Scorpion*. Ketika embargo masih berlaku, Inggris secara terang-terangan melarang penggunaan tank *Scorpion* saat konflik

di Aceh.

Pada saat itu, TNI memanfaatkan pesawat tempur Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30 serta dua buah helikopter jenis MI-35 yang dibeli dari Rusia sebagai alutsista utamanya. Kebijakan ini bertujuan agar TNI –AU dapat mempertahankan wilayah udara RI secara lebih efektif lagi mengingat sudah banyak pesawat-pesawat tempur Indonesia yang sudah tidak layak terbang dan banyak yang termakan usia.

Kepemimpinan strategis juga ditunjukkan Presiden Megawati dalam kepemimpinannya dengan membentuk badan-badan yang di kemudian hari menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas negara antara lain: Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (sekarang BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (sekarang KPAI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kesimpulan

Kepemimpinan Presiden Megawati berhasil mengatasi sebagian besar krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia pada tahun 2001-2004. Krisis

tersebut terdiri atas: 1) krisis ekonomi yang diselesaikan melalui berbagai upaya perundingan, diplomasi, dan kebijakan pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, 2) krisis politik dalam negeri dan luar negeri yang diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan politik dan diplomasi sesuai amanat UUD 1945, 3) krisis sosial yang berupa konflik masyarakat etnik dan agama yang diselesaikan melalui berbagai perundingan damai dan kesepakatan bersama, 4) konflik lingkungan yang diselesaikan melalui pengesahan kebijakan pemerintah dan pembentukan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), dan, 5) krisis bidang pertahanan dan keamanan yang diselesaikan melalui pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan kebijakan penyejahteraan prajurit TNI/Polri.

Keberhasilan-keberhasilan tersebut menjadi pencapaian terbesar Presiden Republik Indonesia pada tahun 2001-2004 (Era Presiden Megawati Soekarnoputri). Dengan menggunakan kerangka analisa Byman, D., & Pollack, K. (2001) mengenai kepemimpinan individu, Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai aktor sentral dalam kepemimpinan nasional berperan besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Kepemimpinan Presiden Megawati kemudian membentuk perilaku Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang lebih

terdesentralisasi, sistem politik yang lebih demokratis, situasi sosial antar etnis yang lebih kondusif, tata kelola lingkungan yang lebih baik, serta memiliki kapabilitas pertahanan yang kompeten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah faktor yang menentukan keberhasilan Indonesia untuk keluar dari krisis multidimensional melalui kapasitasnya sebagai pemimpin negara yang mampu berperan dalam pengambilan kebijakan di level domestik sekaligus menjadi representasi negara di lingkungan internasional.

Keberhasilan tersebut juga menjadi landasan yang kokoh bagi presiden selanjutnya untuk melanjutkan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan nasional di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adian, Donny Gahral. (2003). Mencegah Lahirnya Terorisme Negara: Indonesia Pasca Bom Bali. XXXII, No. 1. Jakarta: CSIS.
- Avolio, B. J. (2007). Promoting more integrative strategies for leadership theory-building. *American Psychologist*, 62(1), 25–33. DOI: 10.1037/0003-066X.62.1.25
- Basri, M.C. (2013). A Tale of Two Crises: Indonesia's Political Economy. Working Papers 57, JICA Research Institute. DOI: 10.18884/00000660.
- Byman, D., & Pollack, K. (2001). Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesman Back In. *International Security*, 25(4), 107-146.

- Buzan, Barry. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. United Kingdom: Lynne Rienner Publisher.
- Bryman, A. (1986). *Leadership in Organizations*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2012). *Laporan Tim Kajian Pola Krisis Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dahuri, R. dan K. Samah. (2019). *The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fiedler, F.E. (1967). *A Theory of Leadership Effectiveness*. New York: McGraw-Hill Fleishman, E.A.
- Harahap, Suheri. (2019). Konflik Etnis dan Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*. 1(2),1-19. DOI: 10.30829/jisa.v1i2.5096.
- Kuncoro, M. (2011). The Global Economic Crisis and Its Impact on Indonesia's Education. *Journal of Indonesia Economy and Business*, 26(1), 47-63.
- Komunitas Peduli Komunikasi Indonesia. (2004). *Megawati Membangun Negeri*. Jakarta: Komunitas Peduli Komunikasi Indonesia Press.
- Lukman, A. (2004). Krisis Multidimensi dan Sengketa Tanah di Indonesia. *Hukum dan Perdagangan*, Oktober-Desember, 292-316.
- Moleong, J Lexy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Putnam, R. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 42(3), 427-460.
- Robinson, R. & Rosser, A. (1998). Contesting Reform: Indonesia's New Order and the IMF. *World Development*, 26(8), 1593-1609.
- Sumantyo, Riwi. (2008). *Masalah Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Kita*. Jakarta: Harian Merdeka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wirutomo, Paulus. (2012). "Menggagas Indonesia Masa Depan?". Makalah yang dipresentasikan dalam Dies Natalis Universitas Indonesia. Lihat Konflik Etnik di Indonesia: Satu Kajian Kes di Bandararaya Medan.
- Wuryandari (Ed). (2008). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Windiani, Reni. (2017). Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16, (2), 135-152.
- Yin, Robert K. (2013). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.